



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO

NOMOR **10** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa dengan perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PANTOR	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	





- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASE	SEKDA	WASUP
				

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAG HUKUM	DINAS/DAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan

KABAG HUKUM	DINAS/DAKUM/ ANTOR	AS	SEKDA	WABUP
				

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
2	2	1	3	

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 326);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 41).

KADAG HUKUM	DINASRACAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

33. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp.812.337.940.000,- bertambah sebesar Rp.1.945.170.406,- sehingga menjadi Rp.814.283.110.406,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.75.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.945.170.406,- sehingga menjadi Rp.76.945.170.406,- yang terdiri atas :
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.56.469.240.564,- bertambah sebesar Rp.1.945.170.406,- sehingga menjadi Rp.58.414.410.970,-
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (11) sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	AS	SEKDA	WABUP
				

## Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.8.191.118.715,- (*Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- Pajak Hotel;
  - Pajak Restoran;
  - Pajak Hiburan;
  - Pajak Reklame;
  - Pajak Penerangan Jalan;
  - Pajak Sarang Burung Walet;
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan/atau
  - Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.134.000.000,- berkurang sebesar (Rp.134.000.000,-) sehingga menjadi Rp.0,-
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- berkurang sebesar (Rp.500.000.000,-) sehingga menjadi Rp.0,-
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.1.500.000,- berkurang sebesar (Rp.1.500.000,-) sehingga menjadi Rp.0,-
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.3.600.000.000,- berkurang sebesar (Rp.3.600.000.000,-) sehingga menjadi Rp.0,-
- (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp.0,- bertambah sebesar Rp.4.235.500.000,- sehingga menjadi Rp.4.235.500.000,- (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) semula direncanakan sebesar

KABAG HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	AS	SEKDA	WABUP
A	1	f	g	

Rp.56.469.240.564,- bertambah sebesar Rp.1.945.170.406,- sehingga menjadi Rp.58.414.410.970,- yang terdiri:

e. Pendapatan BLUD.

- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.41.619.750.062,- bertambah sebesar Rp.1.945.170.406,- sehingga menjadi Rp.43.564.920.468,-
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

Anggaran Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp.822.305.293.000,- bertambah sebesar Rp.13.756.792.968,- sehingga menjadi Rp.836.062.085.968,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;  
b. Belanja Modal;  
d. Belanja Transfer.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.593.346.900.438,- bertambah sebesar Rp.6.836.876.232,- sehingga menjadi Rp.600.183.776.670,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;  
b. Belanja Barang dan Jasa; dan/atau  
c. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.394.208.819.228,- berkurang sebesar (Rp.3.703.024.820,-) sehingga menjadi Rp.390.505.794.408,-
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.179.605.859.734,- bertambah sebesar Rp.8.816.469.010,- sehingga menjadi Rp.188.422.328.744,-
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.19.532.221.476,- bertambah sebesar Rp.1.723.432.042,- sehingga menjadi Rp.21.255.653.518,-
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	DINAS DAN PANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp.394.208.819.228,-, berkurang sebesar (Rp.3.703.024.820,-) sehingga menjadi Rp.390.505.794.408,- yang terdiri atas:
    - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
    - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
    - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
    - g. Belanja Pegawai BLUD.
  - (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.284.064.477.462,- berkurang sebesar (Rp.5.541.125.645,-) sehingga menjadi Rp.278.523.351.817,-
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.32.925.325.134,- bertambah sebesar Rp.52.983.516,- sehingga menjadi Rp.32.978.308.650,-
  - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.46.192.036.077,- bertambah sebesar Rp.1.511.815.310,- sehingga menjadi Rp.47.703.851.387,-
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp.18.348.458.191,- bertambah sebesar Rp.273.301.999,- sehingga menjadi Rp.18.621.760.190,-
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp.179.605.859.734,- bertambah sebesar Rp.8.816.469.010,- sehingga menjadi Rp.188.422.328.744,- yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

KABAG HUKUM	DINASIBDAN NANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan/atau
  - i. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.33.432.394.068,- bertambah sebesar Rp.3.073.492.120,- sehingga menjadi Rp.36.505.886.188,-
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.68.963.113.013,- berkurang sebesar (Rp.1.089.570.585,-) sehingga menjadi Rp. 67.873.542.428,00,-
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.7.384.915.760,- bertambah sebesar Rp.3.158.006.605,- sehingga menjadi Rp.10.542.922.365,-
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.17.776.834.083,- bertambah sebesar Rp.4.841.477.391,- sehingga menjadi Rp.22.618.311.474,-
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.1.127.290.000,- bertambah sebesar Rp.521.523.940,- sehingga menjadi Rp.1.648.813.940,-
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp.14.412.813.872,- berkurang sebesar (Rp.2.032.970.000,-) sehingga menjadi Rp.12.379.843.872,-
  - (9) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp.9.789.254.000,- berkurang sebesar (Rp.933.797.310,-) sehingga menjadi Rp.8.855.456.690,-
  - (10) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp.22.092.024.938,- bertambah sebesar Rp.1.278.306.849,- sehingga menjadi Rp.23.370.331.787,-
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp.19.532.221.476,-

KABAG HUKUM	DINAS/DAWA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

bertambah sebesar Rp.1.723.432.042,- sehingga menjadi Rp.21.255.653.518,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia; dan/atau
  - (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.18.786.691.500,- bertambah sebesar Rp.1.723.432.042,- sehingga menjadi Rp.20.510.123.542,-
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.109.148.969.747,- bertambah sebesar Rp.6.879.777.298,- sehingga menjadi Rp.116.028.747.045,- yang terdiri atas :
    - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
    - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
    - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
    - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.20.187.286.234,- bertambah sebesar Rp.3.158.486.930,- sehingga menjadi Rp.23.345.773.164,-
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.34.611.814.353,- bertambah sebesar Rp.2.304.444.720,- sehingga menjadi Rp.36.916.259.073,-
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.50.944.830.000,- bertambah sebesar Rp.1.461.845.648,- sehingga menjadi Rp.52.406.675.648,-
  - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp.425.000.000,- berkurang sebesar (Rp.45.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 380.000.000,-
11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
A	f	f	g	

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d semula direncanakan sebesar Rp.118.809.422.815,- bertambah sebesar Rp.40.139.438,- sehingga menjadi Rp.118.849.562.253,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil; dan/atau
  - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Hagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.1.056.324.215,- bertambah sebesar Rp.2.545.862,- sehingga menjadi Rp.1.058.870.077,-
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.117.753.098.600,- bertambah sebesar Rp.37.593.576,- sehingga menjadi Rp.117.790.692.176,-
12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 20**

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp.9.967.353.000,- bertambah sebesar Rp.11.811.622.562,- sehingga menjadi Rp.21.778.975.562,- yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan;

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 21**

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.9.967.353.000,- bertambah sebesar Rp.11.811.622.562,- sehingga menjadi Rp.21.778.975.562,- yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 23**

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula direncanakan sebesar (Rp.9.967.353.000,-) bertambah sebesar (Rp.11.811.622.562,-) sehingga menjadi (Rp.21.778.975.562,-);
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp.9.967.353.000,- bertambah sebesar Rp.11.811.622.562,- sehingga menjadi Rp.21.778.975.562,-

KABAG HUKUM	DRABADAN MINTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>A</i>	<i>P</i>	<i>f</i>	<i>m</i>	

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

16. Diantara Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan satu pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26A**

Perubahan anggaran penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal I akan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.

**Pasal II**

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 27 Mei 2024

**Pj. BUPATI BOALEMO,**



**SHERMAN MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 27 Mei 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**



**SUPANDRA NUR**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 10 )



**KABUPATEN BOALEMO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>75.000.000.000,00</b>	<b>76.945.170.406,00</b>	<b>1.945.170.406,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	8.191.118.715,00	8.191.118.715,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	134.000.000,00	0,00	-134.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	134.000.000,00	0,00	-134.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	134.000.000,00	0,00	-134.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.600.000.000,00	0,00	-3.600.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.600.000.000,00	0,00	-3.600.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.600.000.000,00	0,00	-3.600.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.228.800.000,00	1.228.800.000,00	0,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	0,00	765.500.000,00	765.500.000,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	0,00	765.500.000,00	765.500.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	259.300.000,00	259.300.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	259.300.000,00	259.300.000,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.1.01.14.29	Pajak Tanah Diatome	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
4.1.01.14.29.0001	Pajak Tanah Diatome	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.228.800.000,00	100.000,00	-1.228.700.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.228.800.000,00	100.000,00	-1.228.700.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.347.818.715,00	1.347.818.715,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.347.818.715,00	1.347.818.715,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.347.818.715,00	1.347.818.715,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	4.235.500.000,00	4.235.500.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	0,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	0,00	43.332.000,00	43.332.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	43.668.000,00	43.668.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	0,00	500.000,00	500.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	700.000,00	700.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00	300.000,00	300.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.861.600.000,00	1.861.600.000,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	855.000.000,00	855.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	*WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	706.600.000,00	706.600.000,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	351.000.000,00	351.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	351.000.000,00	351.000.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.478.040.721,00	8.478.040.721,00	0,00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	8.478.040.721,00	8.478.040.721,00	0,00
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	8.478.040.721,00	8.478.040.721,00	0,00
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	8.478.040.721,00	8.478.040.721,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.469.240.564,00	58.414.410.970,00	1.945.170.406,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.799.490.502,00	4.799.490.502,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.799.490.502,00	2.799.490.502,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.799.490.502,00	2.799.490.502,00	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINACIBADAR KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
1	1	1	1	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	41.619.750.062,00	43.564.920.468,00	1.945.170.406,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	41.041.506.638,00	42.984.816.695,00	1.943.310.057,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	41.041.506.638,00	42.984.816.695,00	1.943.310.057,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	203.746.576,00	203.746.576,00	0,00
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	203.746.576,00	203.746.576,00	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	350.496.848,00	352.357.197,00	1.860.349,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	299.651,00	2.160.000,00	1.860.349,00
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	350.197.197,00	350.197.197,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>737.337.940.000,00</b>	<b>737.337.940.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	716.337.940.000,00	716.337.940.000,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	645.644.725.000,00	645.644.725.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.103.856.000,00	9.103.856.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.686.427.000,00	1.686.427.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.260.230.000,00	2.201.322.000,00	-58.908.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	58.908.000,00	58.908.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.203.000,00	12.203.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3.469.537.000,00	0,00	-3.469.537.000,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.670.639.000,00	1.670.639.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	3.469.537.000,00	3.469.537.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	464.964.517.000,00	464.964.517.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	370.664.564.000,00	370.664.564.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5.622.327.000,00	5.622.327.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	40.810.207.000,00	40.810.207.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.074.769.000,00	26.074.769.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.792.650.000,00	21.792.650.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.145.321.000,00	81.145.321.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.064.625.000,00	0,00	-2.064.625.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.227.622.000,00	0,00	-12.227.622.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.424.723.000,00	0,00	-7.424.723.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	1.804.994.000,00	1.804.994.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	42.420.813.000,00	0,00	-42.420.813.000,00
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	1.804.994.000,00	0,00	-1.804.994.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.202.544.000,00	0,00	-15.202.544.000,00
4.2.01.01.03.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	0,00	2.064.625.000,00	2.064.625.000,00
4.2.01.01.03.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	0,00	12.227.622.000,00	12.227.622.000,00
4.2.01.01.03.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	0,00	7.424.723.000,00	7.424.723.000,00
4.2.01.01.03.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	15.202.544.000,00	15.202.544.000,00
4.2.01.01.03.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	0,00	40.484.813.000,00	40.484.813.000,00
4.2.01.01.03.0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	0,00	1.936.000.000,00	1.936.000.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90.431.031.000,00	90.431.031.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.593.440.000,00	18.593.440.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.765.000.000,00	1.765.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	40.374.426.000,00	40.374.426.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.684.784.000,00	1.684.784.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.426.890.000,00	3.426.890.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.202.271.000,00	0,00	-6.202.271.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	314.131.000,00	0,00	-314.131.000,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	9.789.254.000,00	0,00	-9.789.254.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.247.615.000,00	0,00	-3.247.615.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.037.590.000,00	4.037.590.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	364.630.000,00	364.630.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	6.202.271.000,00	6.202.271.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	314.131.000,00	314.131.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	9.789.254.000,00	9.789.254.000,00
4.2.01.01.04.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	3.247.615.000,00	3.247.615.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	70.693.215.000,00	70.693.215.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	70.693.215.000,00	70.693.215.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	70.693.215.000,00	70.693.215.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.795.000.000,00	3.795.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>812.337.940.000,00</b>	<b>814.283.110.406,00</b>	<b>1.945.170.406,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>593.346.900.438,00</b>	<b>600.183.776.670,00</b>	<b>6.836.876.232,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	394.208.819.228,00	390.505.794.408,00	-3.703.024.820,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	284.064.477.462,00	278.523.351.817,00	-5.541.125.645,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	208.446.293.851,00	201.752.608.783,00	-6.693.685.068,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	163.354.807.891,00	162.009.380.431,00	-1.345.427.460,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.091.485.960,00	39.743.228.352,00	-5.348.257.608,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.547.827.623,00	20.610.395.263,00	62.567.640,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.398.033.431,00	15.446.692.031,00	48.658.600,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.149.794.192,00	5.163.703.232,00	13.909.040,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.520.902.000,00	5.521.879.200,00	977.200,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.520.902.000,00	5.521.879.200,00	977.200,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.931.146.236,00	18.176.673.182,00	245.526.946,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.285.156.796,00	12.500.083.742,00	214.926.946,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.645.989.440,00	5.676.589.440,00	30.600.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.024.760.192,00	3.028.740.192,00	3.980.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.982.802.192,00	2.986.782.192,00	3.980.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	41.958.000,00	41.958.000,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.834.869.232,00	13.853.590.523,00	18.721.291,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.034.157.554,00	10.042.740.045,00	8.582.491,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.800.711.678,00	3.810.850.478,00	10.138.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	131.432.995,00	467.187.655,00	335.754.660,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	131.432.995,00	467.187.655,00	335.754.660,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.405.897,00	3.913.091,00	507.194,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.449.965,00	2.952.309,00	502.344,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	955.932,00	960.782,00	4.850,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.778.404.714,00	13.262.929.206,00	484.524.492,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.555.877.084,00	11.040.401.576,00	484.524.492,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.222.527.630,00	2.222.527.630,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	461.244.246,00	461.244.246,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	343.807.296,00	343.807.296,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	117.436.950,00	117.436.950,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.383.728.468,00	1.383.728.468,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.031.426.116,00	1.031.426.116,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	352.302.352,00	352.302.352,00	0,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	462.008,00	462.008,00	0,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	462.008,00	462.008,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	32.925.325.134,00	32.978.308.650,00	52.983.516,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.031.271.793,00	11.031.271.793,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11.031.271.793,00	11.031.271.793,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.118.421.458,00	1.118.421.458,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.118.421.458,00	1.118.421.458,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	20.775.631.883,00	20.828.615.399,00	52.983.516,00

KABAG HUKUM	DINASIBERDAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	20.775.631.883,00	20.828.615.399,00	52.983.516,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.192.036.077,00	47.703.851.387,00	1.511.815.310,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	274.402.477,00	274.402.477,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.489.000,00	4.489.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	50.250,00	50.250,00	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	167.500,00	167.500,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.164.800,00	41.164.800,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	45.151.927,00	45.151.927,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	39.195.000,00	39.195.000,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	52.313.600,00	52.313.600,00	0,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.847.500,00	2.847.500,00	0,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.770.000,00	20.770.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.586.100,00	6.586.100,00	0,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.725.000,00	11.725.000,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	40.374.426.000,00	40.374.426.000,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	40.374.426.000,00	40.374.426.000,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.426.890.000,00	3.426.890.000,00	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	3.426.890.000,00	3.426.890.000,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.684.784.000,00	1.684.784.000,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.684.784.000,00	1.684.784.000,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	144.000.000,00	1.661.575.310,00	1.517.575.310,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	144.000.000,00	1.661.575.310,00	1.517.575.310,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	235.220.000,00	229.460.000,00	-5.760.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	172.500.000,00	154.500.000,00	-18.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	53.720.000,00	65.960.000,00	12.240.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.829.357.668,00	11.829.357.668,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	797.475.000,00	561.540.000,00	-235.935.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	797.475.000,00	561.540.000,00	-235.935.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	41.649.300,00	41.649.300,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	41.649.300,00	41.649.300,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	58.805.040,00	58.805.040,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	58.805.040,00	58.805.040,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	56.154.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	56.154.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	93.146.550,00	93.146.550,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	93.146.550,00	93.146.550,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.183.762.500,00	2.183.762.500,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.183.762.500,00	2.183.762.500,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	325.442.278,00	325.442.278,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	325.442.278,00	325.442.278,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.701.390.000,00	3.701.390.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.651.390.000,00	3.651.390.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.264.800.000,00	3.264.800.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINAS/RAJAWANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.264.800.000,00	3.264.800.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	255.935.000,00	235.935.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	255.935.000,00	235.935.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	388.284.696,00	388.284.696,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	73.008.000,00	73.008.000,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	73.008.000,00	73.008.000,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.221.120,00	10.221.120,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.221.120,00	10.221.120,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.601.600,00	131.601.600,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.601.600,00	131.601.600,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.845.620,00	10.845.620,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.845.620,00	10.845.620,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.706,00	3.706,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.706,00	3.706,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	135.153.450,00	135.153.450,00	0,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	24.750,00	24.750,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	82.500,00	82.500,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.275.200,00	20.275.200,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.239.000,00	22.239.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.305.000,00	19.305.000,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	25.766.400,00	25.766.400,00	0,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.402.500,00	1.402.500,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.230.000,00	10.230.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.243.900,00	3.243.900,00	0,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	825.000,00	825.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	460.880.000,00	460.880.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	18.348.458.191,00	18.621.760.190,00	273.301.999,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	18.348.458.191,00	18.621.760.190,00	273.301.999,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	18.348.458.191,00	18.621.760.190,00	273.301.999,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.605.859.734,00	188.422.328.744,00	8.816.469.010,00
5.1.02.01	Belanja Barang	33.432.394.068,00	36.505.886.188,00	3.073.492.120,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.295.447.708,00	36.420.739.828,00	3.125.292.120,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	40.956.000,00	40.956.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.371.575.925,00	1.426.002.090,00	54.426.165,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	21.970.000,00	38.602.000,00	16.632.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	762.800,00	762.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.084.902.452,00	1.084.902.452,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	227.722.320,00	256.260.020,00	28.537.700,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	51.950.000,00	51.950.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.803.785,00	2.803.785,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.299.802.440,00	954.646.209,00	-345.156.231,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	594.855.735,00	667.144.798,00	72.289.063,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.146.532.537,00	1.394.417.841,00	247.885.304,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	99.760.000,00	108.180.000,00	8.420.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	463.483.188,00	725.320.948,00	261.837.760,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	147.101.741,00	157.240.271,00	10.138.530,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	100.664.429,00	117.662.324,00	16.997.895,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	413.307.500,00	437.847.500,00	24.540.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.561.680,00	52.561.680,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.336.889.955,00	1.336.889.955,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.209.424.834,00	1.209.424.834,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.750.856.026,00	13.963.561.751,00	212.705.725,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	350.000.000,00	749.620.000,00	399.620.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.676.795.926,00	2.097.662.356,00	420.866.430,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.449.815.500,00	5.473.106.500,00	1.023.291.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.428.158.525,00	1.939.015.804,00	510.857.279,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	161.010.000,00	225.300.000,00	64.290.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	575.614.360,00	566.858.360,00	-8.756.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	274.555.000,00	259.595.000,00	-14.960.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	32.400.000,00	37.400.000,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	412.500.000,00	412.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	152.500.000,00	183.850.000,00	31.350.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	54.250.000,00	54.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.000.000,00	12.000.000,00	-22.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	190.815.050,00	296.294.550,00	105.479.500,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	792.000,00	792.000,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	792.000,00	792.000,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	136.154.360,00	84.354.360,00	-51.800.000,00
5.1.02.01.04.0666	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	136.154.360,00	84.354.360,00	-51.800.000,00

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
2	1	6	7	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02	Belanja Jasa	68.963.113.013,00	67.873.542.428,00	-1.089.570.585,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.239.065.371,00	48.661.195.366,00	-577.870.005,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.476.637.500,00	2.821.437.500,00	344.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	796.600.000,00	1.040.800.000,00	244.200.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.395.900.000,00	1.395.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.800.000,00	31.400.000,00	24.600.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	490.800.000,00	490.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.617.000.000,00	3.769.108.330,00	-847.891.670,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.304.970.000,00	8.575.970.000,00	-729.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	896.300.000,00	849.890.000,00	-46.410.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.372.400.000,00	2.276.400.000,00	-96.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	625.200.000,00	535.200.000,00	-90.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	367.200.000,00	379.950.000,00	12.750.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	92.100.000,00	76.500.000,00	-15.600.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	11.475.000,00	11.475.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	135.000.000,00	136.500.000,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.582.125.000,00	11.483.966.667,00	-98.158.333,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	355.200.000,00	184.800.000,00	-170.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	328.050.000,00	919.175.000,00	591.125.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.062.150.000,00	1.558.350.000,00	496.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.723.100.000,00	2.921.725.000,00	198.625.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	155.400.000,00	245.400.000,00	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	15.000.000,00	88.400.000,00	73.400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.522.825.000,00	1.372.800.000,00	-150.025.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	179.100.000,00	92.000.000,00	-87.100.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,00	98.500.000,00	92.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	3.391.500,00	3.391.500,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.373.000.000,00	1.186.500.000,00	-1.186.500.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	4.745.580,00	4.745.580,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	42.596.000,00	42.596.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	690.450.000,00	965.700.000,00	275.250.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.351.980,00	2.551.980,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	419.653.191,00	397.134.977,00	-22.518.214,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.478.832.932,00	2.280.119.472,00	-198.713.460,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	614.253.768,00	945.244.360,00	330.990.592,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	18.887.500,00	118.887.500,00	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	171.682.500,00	171.332.500,00	-350.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	712.000.000,00	712.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	68.044.000,00	68.044.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.955.798.415,00	10.821.929.835,00	-133.868.580,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.388.639.592,00	1.388.639.592,00	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.620.000.000,00	4.620.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.680.714.915,00	3.680.714.915,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	556.565.508,00	157.248.000,00	-399.317.508,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	275.327.328,00	275.327.328,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	9.878.400,00	0,00	-9.878.400,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	991.210.000,00	1.301.840.000,00	310.630.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	533.000.000,00	735.400.000,00	202.400.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	104.000.000,00	128.000.000,00	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINAS/CAKUPAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.04.0078	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	23.710.000,00	37.190.000,00	13.480.000,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	323.500.000,00	393.250.000,00	69.750.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.826.821.000,00	4.127.661.000,00	-699.160.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.642.821.000,00	3.932.661.000,00	-710.160.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.726.418.227,00	1.526.418.227,00	-200.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	1.441.418.227,00	1.241.418.227,00	-200.000.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	491.270.000,00	491.270.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	23.490.000,00	23.490.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	137.750.000,00	137.750.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	330.030.000,00	330.030.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	532.530.000,00	613.228.000,00	80.698.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	132.530.000,00	150.338.000,00	17.808.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	62.890.000,00	62.890.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.384.915.760,00	10.542.922.365,00	3.158.006.605,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	463.452.160,00	572.961.710,00	109.509.550,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	160.442.160,00	165.442.160,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	133.000.000,00	133.002.050,00	2.050,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	53.340.000,00	111.370.000,00	58.030.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	7.190.000,00	7.190.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	26.687.500,00	26.687.500,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	42.620.000,00	83.220.000,00	40.600.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	665.834.000,00	852.362.000,00	186.528.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	276.834.000,00	447.362.000,00	170.528.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	170.000.000,00	186.000.000,00	16.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.255.629.600,00	9.117.598.655,00	2.861.969.055,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.300.629.600,00	7.242.824.000,00	2.942.194.400,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.285.000.000,00	1.204.774.655,00	-80.225.345,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.776.834.083,00	22.618.311.474,00	4.841.477.391,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.776.834.083,00	22.618.311.474,00	4.841.477.391,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.140.201.769,00	19.094.981.026,00	3.954.779.257,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	334.225.000,00	334.225.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.020.932.314,00	2.505.790.448,00	484.858.134,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	403.220.000,00	432.705.000,00	29.485.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	212.480.000,00	250.610.000,00	38.130.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.127.290.000,00	1.648.813.940,00	521.523.940,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	894.250.000,00	508.420.000,00	-385.830.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	59.250.000,00	392.500.000,00	333.250.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	115.920.000,00	115.920.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	835.000.000,00	0,00	-835.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	233.040.000,00	1.140.393.940,00	907.353.940,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	205.590.000,00	960.943.940,00	755.353.940,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	27.450.000,00	179.450.000,00	152.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.412.813.872,00	12.379.843.872,00	-2.032.970.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.412.813.872,00	12.379.843.872,00	-2.032.970.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.412.813.872,00	12.379.843.872,00	-2.032.970.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	4.627.220.000,00	4.627.220.000,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	4.217.590.000,00	4.217.590.000,00	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	4.037.590.000,00	4.037.590.000,00	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	409.630.000,00	409.630.000,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	364.630.000,00	364.630.000,00	0,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.789.254.000,00	8.855.456.690,00	-933.797.310,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.789.254.000,00	8.855.456.690,00	-933.797.310,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.789.254.000,00	8.855.456.690,00	-933.797.310,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.092.024.938,00	23.370.331.787,00	1.278.306.849,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.092.024.938,00	23.370.331.787,00	1.278.306.849,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.092.024.938,00	23.370.331.787,00	1.278.306.849,00
5.1.05	Belanja Hibah	19.532.221.476,00	21.255.653.518,00	1.723.432.042,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.786.691.500,00	20.510.123.542,00	1.723.432.042,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.786.691.500,00	20.510.123.542,00	1.723.432.042,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.786.691.500,00	20.510.123.542,00	1.723.432.042,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976,00	745.529.976,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976,00	745.529.976,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976,00	745.529.976,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>109.148.969.747,00</b>	<b>116.028.747.045,00</b>	<b>6.879.777.298,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.187.286.234,00	23.345.773.164,00	3.158.486.930,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.253.300.000,00	4.252.400.000,00	-900.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.253.300.000,00	4.252.400.000,00	-900.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.109.800.000,00	2.109.800.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	85.000.000,00	84.100.000,00	-900.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.058.500.000,00	2.058.500.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.294.200,00	3.294.200,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	3.294.200,00	3.294.200,00	0,00
5.2.02.03.03.0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	3.294.200,00	3.294.200,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.224.778.320,00	4.961.086.990,00	1.736.308.670,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	25.487.500,00	40.487.500,00	15.000.000,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.487.500,00	30.487.500,00	15.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.169.516.170,00	4.879.449.840,00	1.709.933.670,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.478.944.500,00	3.973.384.500,00	1.494.440.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.052.500,00	9.157.500,00	6.105.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	334.969.170,00	390.195.340,00	55.226.170,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	352.550.000,00	506.712.500,00	154.162.500,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.774.650,00	41.149.650,00	11.375.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	13.875.000,00	13.875.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.655.000,00	19.155.000,00	7.500.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	18.119.650,00	8.119.650,00	-10.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.597.907.312,00	1.625.267.312,00	27.360.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	20.942.312,00	30.302.312,00	9.360.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	11.000.000,00	20.360.000,00	9.360.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.942.312,00	9.942.312,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.576.965.000,00	1.594.965.000,00	18.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.576.965.000,00	1.594.965.000,00	18.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.187.928.101,00	5.187.928.101,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.959.145.341,00	4.959.145.341,00	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.819.534.213,00	1.922.016.751,00	102.482.538,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	51.018.937,00	54.000.000,00	2.981.063,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.576.211.240,00	1.576.211.240,00	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	977.549.811,00	979.512.210,00	1.962.399,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	84.840.000,00	84.840.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	449.991.140,00	342.565.140,00	-107.426.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	228.782.760,00	228.782.760,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	228.782.760,00	228.782.760,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	450.000.000,00	1.262.675.000,00	812.675.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	450.000.000,00	1.262.675.000,00	812.675.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	0,00	398.475.000,00	398.475.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	450.000.000,00	864.200.000,00	414.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.280.758.500,00	1.717.925.500,00	437.167.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.080.531.000,00	1.541.158.500,00	460.627.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.080.531.000,00	1.534.498.500,00	453.967.500,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	200.227.500,00	176.767.000,00	-23.460.500,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	100.552.500,00	156.067.000,00	55.514.500,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	78.975.000,00	0,00	-78.975.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.465.586.968,00	3.465.586.968,00	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.465.586.968,00	3.465.586.968,00	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.465.586.968,00	3.465.586.968,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	722.232.833,00	868.109.093,00	145.876.260,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	722.232.833,00	868.109.093,00	145.876.260,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	722.232.833,00	868.109.093,00	145.876.260,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.611.814.353,00	36.916.259.073,00	2.304.444.720,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	34.211.814.353,00	36.456.259.073,00	2.244.444.720,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.991.314.353,00	36.235.759.073,00	2.244.444.720,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	633.000.000,00	753.000.000,00	120.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	6.715.354.799,00	6.715.354.799,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	653.040.000,00	653.040.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.371.644.330,00	26.018.492.800,00	2.646.848.470,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	55.696.250,00	55.696.250,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	425.250.000,00	425.250.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	934.275.224,00	213.375.224,00	-720.900.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	438.750.000,00	400.750.000,00	-38.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	130.800.000,00	130.800.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	220.500.000,00	220.500.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	220.500.000,00	220.500.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	460.000.000,00	60.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	460.000.000,00	60.000.000,00



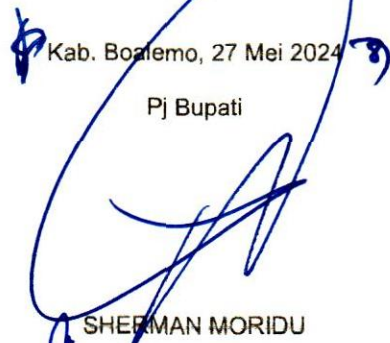
KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	460.000.000,00	60.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.944.830.000,00	52.406.675.648,00	1.461.845.648,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	44.819.500.000,00	46.018.275.648,00	1.198.775.648,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	43.381.500.000,00	44.480.275.648,00	1.098.775.648,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	43.063.500.000,00	44.162.275.648,00	1.098.775.648,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.438.000.000,00	1.538.000.000,00	100.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.438.000.000,00	1.538.000.000,00	100.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.524.830.000,00	5.608.100.000,00	83.270.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.585.000.000,00	4.630.000.000,00	45.000.000,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.860.000.000,00	2.810.000.000,00	-50.000.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.725.000.000,00	1.820.000.000,00	95.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	889.830.000,00	928.100.000,00	38.270.000,00
5.2.04.02.06.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	344.500.000,00	417.500.000,00	73.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	545.330.000,00	510.600.000,00	-34.730.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	600.500.000,00	730.300.000,00	129.800.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	600.500.000,00	600.500.000,00	0,00
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	600.500.000,00	600.500.000,00	0,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	129.800.000,00	129.800.000,00
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	129.800.000,00	129.800.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.780.039.160,00	2.780.039.160,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.480.039.160,00	2.480.039.160,00	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.480.039.160,00	2.480.039.160,00	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.480.039.160,00	2.480.039.160,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	425.000.000,00	380.000.000,00	-45.000.000,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	425.000.000,00	380.000.000,00	-45.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	425.000.000,00	380.000.000,00	-45.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	375.000.000,00	330.000.000,00	-45.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>118.809.422.815,00</b>	<b>118.849.562.253,00</b>	<b>40.139.438,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.056.324.215,00	1.058.870.077,00	2.545.862,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	819.111.891,00	820.588.491,00	1.476.600,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	819.111.891,00	820.588.491,00	1.476.600,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	819.111.891,00	820.588.491,00	1.476.600,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	238.281.586,00	1.069.262,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	238.281.586,00	1.069.262,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	238.281.586,00	1.069.262,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.753.098.600,00	117.790.692.176,00	37.593.576,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.753.098.600,00	117.790.692.176,00	37.593.576,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.753.098.600,00	117.790.692.176,00	37.593.576,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	70.693.215.000,00	70.693.215.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	47.059.883.600,00	47.097.477.176,00	37.593.576,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>822.305.293.000,00</b>	<b>836.062.085.968,00</b>	<b>13.756.792.968,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-9.967.353.000,00</b>	<b>-21.778.975.562,00</b>	<b>-11.811.622.562,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.967.353.000,00</b>	<b>21.778.975.562,00</b>	<b>11.811.622.562,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.967.353.000,00	21.778.975.562,00	11.811.622.562,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	3.197.822.000,00	3.197.822.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	3.197.822.000,00	3.197.822.000,00

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	3.197.822.000,00	3.197.822.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	9.967.353.000,00	18.581.153.562,00	8.613.800.562,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	9.967.353.000,00	18.581.153.562,00	8.613.800.562,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>9.967.353.000,00</b>	<b>21.778.975.562,00</b>	<b>11.811.622.562,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>9.967.353.000,00</b>	<b>21.778.975.562,00</b>	<b>11.811.622.562,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

  
 Kab. Boalemo, 27 Mei 2024  
 Pj Bupati  
 SHERMAN MORIDU